

## PENGARUH KEPEMIMPINAN KEPALA DESA TERHADAP EFEKTIVITAS PELAYANAN PADA MASYARAKAT DESA PAKU HAJI KECAMATAN PONDOK KUBANG KABUPATEN BENGKULU TENGAH

Sukmiyanti<sup>1)</sup>; Mulyadi<sup>2)</sup>; Erlan Dwisnu<sup>3)</sup>

<sup>1)2)3)</sup> Program of Public Administration Publik

<sup>1)2)3)</sup> Department of Administration Publik, STIA Bengkulu

Email: <sup>1)</sup> [sukmiyanti@gmail.com](mailto:sukmiyanti@gmail.com)

### ARTICLE HISTORY

Received [21 November 2024]

Revised [18 Desember 2024]

Accepted [31 Januari 2025]

### KEYWORDS

Kepemimpinan, Kepala Desa, Efektivitas

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



### ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui gambaran kepemimpinan kepala desa, efektivitas pelayanan pada masyarakat dan pengaruh kepemimpinan kepala desa terhadap efektivitas pelayanan pada masyarakat desa Paku Haji. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan statistik. Populasi penelitian ini sebanyak 566 orang dan sampel dalam penelitian ini sebanyak 84 orang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu teknik observasi, kuesioner dan dokumentasi. Data diolah dengan menggunakan deskriptif statistik dan regresi linier sederhana. Yang mana hasil olah data menunjukkan bahwa gambaran kepemimpinan kepala desa Paku Haji termasuk kedalam kategori tinggi atau baik dan efektivitas pelayanan kepala desa pada masyarakat juga termasuk kedalam kategori tinggi atau baik sedangkan pengaruh kepemimpinan kepala desa terhadap efektivitas pelayanan pada masyarakat yang diuji menggunakan uji regresi sederhana menunjukkan bahwa terdapatnya pengaruh yang positif dan signifikan antara fungsi kepemimpinan kepala desa terhadap efektivitas kepada aparat desa di Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah agar lebih menyadari tugas pentingnya sebagai pelayan masyarakat yang merupakan tanggung jawabnya sebagai aparat desa.

### ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the description of the village head's leadership, the effectiveness of service to the community and the influence of the village head's leadership on the effectiveness of service to the Paku Haji village community. This research method uses a quantitative approach with statistics. The population of this study was 566 people and the sample in this study was 84 people. Data collection techniques in this study were observation techniques, questionnaires and documentation. The data was processed using descriptive statistics and simple linear regression, which the results of data processing showed that the description of the leadership of the Paku Haji village head was included in the high or good category and the effectiveness of the village head's service to the community was also included in the high or good category while the influence of the village head's leadership on the effectiveness of service to the community which was tested using a simple regression test showed that there was a positive and significant influence between the Village Head's. Village Officials in Pondok Kubang, Central Bengkulu Regency, should be more aware of their important duties as public servants which are their responsibility as Village Officials.

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang Masalah

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan NKRI. Desa merupakan wilayah yang penduduknya saling mengenal hidup bergotong-royong, adat istiadat yang sama, tata aturan dan mempunyai langkah serta cara sendiri dalam mengatur kehidupan kemasyarakatannya. Di samping itu, umumnya wilayah desa terdiri atas daerah pertanian, sehingga sebagian besar mata pencahariannya adalah seorang petani. Desa di bawah pemerintahan Kabupaten.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa yang mendasari ditetapkan UU No 3 tahun 2014 ini adalah sebagai berikut: (a) bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (b) bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, (c) dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera; bahwa beberapa ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika dan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, serta kehidupan ketatanegaraan sehingga perlu diubah. (Indonesia 2024). Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Manusia tidak lagi dianggap sebagai faktor produksi tetapi lebih dianggap sebagai asset organisasi yang penting. Keefektifan dan keunggulan organisasi sangat tergantung pada kualitas sumber daya manusia yang dimiliki. (Ichsan 2018).

Kepemimpinan merupakan kegiatan untuk mempengaruhi perilaku orang lain atau seni mempengaruhi perilaku manusia baik perorangan maupun kelompok. Dan satu hal yang perlu diingat bahwa kepemimpinan tidak harus dibatasi oleh aturan-aturan atau tata krama birokrasi. Kepemimpinan dapat terjadi dimanapun dan kapanpun hal ini dikarenakan kepemimpinan dapat terjadi secara alamiah berdasarkan kemampuan pemimpin yang bertujuan agar dapat mempengaruhi sikap dan tindakan orang lain dalam rangka mencapai tujuan. Hal ini sejalan dengan pendapat Sondang P. Siagian (2013:36) yang mengatakan bahwa tujuan suatu organisasi yakni berdasarkan atas cara dan pelaksanaan yang dilakukan oleh pemimpin atau atas dalam rangka mengkoordinasi anggotanya untuk melaksanakan kegiatan. Gaya kepemimpinan yang kurang memperhatikan nasib anggotanya dapat menyebabkan rendahnya produktivitas kerja. Sehingga gaya kepemimpinan harus dapat memengaruhi dan mengubah sikap, tindakan, dan perilaku anggotanya untuk kepentingan dan tujuan organisasi tercapai. Hal ini sesuai dengan pendapat Ranuspandojo (2012:224) Gaya kepemimpinan yaitu perilaku yang dirancang untuk menyatukan tujuan individu atau kelompok dengan tujuan organisasi. Hakikat dari organisasi itu adalah manusia dan kerja sama dalam suatu struktur organisasi yang menciptakan pembagian tugas dan jabatan serta meletakkan batas-batas kebebasan seseorang dalam organisasi. Untuk itu Handoko (2013:5) mengatakan bahwa pengakuan terhadap pentingnya satuan tenaga kerja dalam suatu organisasi adalah perlu. Karena sumber daya manusia merupakan unsur yang vital bagi pencapaian tujuan organisasi. (Erman and Fahrobay 2022). Kepala desa adalah pemimpin formal karena ia menerima pengangkatan resmi dari pemerintah. Penyelenggaraan pemerintahan desa akan lebih sukses jika pelaksanaannya tidak hanya didasarkan kepada peraturan-peraturan, tetapi ditunjang pula dengan dasar hubungan pribadi, hubungan bathin dan kepemimpinan. Seorang pemimpin mempunyai kemampuan untuk memancarkan pengaruhnya terhadap orang lain sedemikian rupa sehingga orang ini mentaati pemimpin secara sukarela disertai kesadaran dan tanpa paksaan. Seni dan pengetahuan kepemimpinan harus dipelajari dan dikuasai oleh kepala desa dan diterapkan. Dengan demikian kepala desa menjadi pemimpin informal (Suryaningrat, 1992).

Perangkat Desa adalah salah satu organ pemerintah desa, selain kepala Desa. sesuai rumusan pasal 1 angka 3 undang-undang Desa, kedudukan perangkat desa adalah untuk pembantu kepala desa dalam menjalankan fungsi pemerintahan.

Perangkat Desa didalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa diatur dalam Bagian Kedua dengan nomenklatur Perangkat Desa. Struktur Perangkat Desa dinyatakan secara tegas dalam Pasal 61 ayat 19 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, bahwa Perangkat Desa terdiri atas: a. sekretariat Desa; b. pelaksana kewilayahan; dan c. pelaksana teknis. Pasal 61 ayat (2) Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala Desa. Struktur Personalia Perangkat Desa secara organisasi pemerintah Desa lebih lanjut diatur dalam Pasal 62 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, bahwa Sekretariat Desa dipimpin oleh sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Mengenai jumlah personalia diatur lebih lanjut Pasal 62 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, menyatakan, bahwa Sekretariat Desa paling banyak terdiri atas 3 (tiga) bidang urusan. Pada pasal 63 ayat (3) memberikan atribusi, bahwa bidang urusan akan diatur dengan Peraturan Menteri. Berkaitan dengan pelaksanaan kewilayahan lebih lanjut diatur pada Pasal 63 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 menyatakan, bahwa Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan. Berkaitan dengan jumlah personalia Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan Desa. Pasal 64 (1) Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional. Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang jumlah seksi sebagai pelaksana teknis ditentukan paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi. Pengaturan ditentukan mengenai pelaksana teknis sebagaimana dimaksud diatur dengan Peraturan Menteri. (Yesa Putriani 2021).

Hambatan-hambatan yang dialami oleh kepala desa dalam menjalankan perannya di antaranya ialah belum meratanya pembangunan desa dikarenakan kurangnya sumber daya manusia dan juga mobilitas kinerja pegawai; kemudian adanya perbedaan usia antara kepala desa yang lebih muda dengan perangkat desa yang lebih tua. Sehingga terjadi keseganan dalam hubungan kerja; lalu Insentif untuk perangkat desa yang belum maksimal dan tidak berimbang antara beban kerja dan juga reward. Hal ini dikarenakan SILTAP yang tidak dibayarkan per bulan; lalu Kurangnya intensitas komunikasi yang diberikan oleh Kepala Desa; dan terakhir, Lumpuhnya peran BPD karena tidak bekerja dengan maksimal sehingga kepala desa bekerja sendiri dalam menampung aspirasi. (Alfian and Rahmat 2019)

Tugas dan fungsi kepala desa, kepala desa berkedudukan sebagai kepala pemerintahan desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintah desa. Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintah desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Merujuk pada Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang susunan organisasi dan tata kerja (SOT) pemerintah desa, untuk melaksanakan tugasnya, kepala desa memiliki fungsi sebagai berikut:

- a) Menyelenggarakan pemerintah desa, seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertahanan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
- b) Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan dan pembangunan dibidang pendidikan Kesehatan
- c) Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan
- d) Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat dibidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga dan karang tuna
- e) Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

Mengingat unit pemerintahan desa adalah bagian integral dari pemerintahan nasional, maka tugas dan fungsi pemerintahan desa tidak terlepas dari tugas dan fungsi pemerintahan nasional .

Oleh unit pemerintahan desa seperti halnya pemerintah desa sebagai unit pemerintahan terendah mempunyai 3 fungsi pokok yaitu:

1. Pelayanan kepada masyarakat
2. Fungsi operasional atau manajemen Pembangunan
3. Fungsi ketata usahaan atau registrasi

Keseluruhan tugas dan fungsi administrasi pemerintahan desa tersebut tidak akan terlaksana dengan baik, manakala tidak ditunjang dari aparatnya dengan melaksanakan sebaik-baiknya apa

yang menjadi tanggung jawab masing-masing aparat. Menyadari betapa pentingnya tugas administrasi pemerintahan desa, maka yang menjadi keharusan bagi kepala desa dan aparatnya merupakan berusaha untuk mengembangkan kecakapan dan ketrampilan mengelola organisasi pemerintahan desa termasuk kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas dibidang pemerintahan, pembangunan dan masyarakat. (Syarif 2010)

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan pendapat H. Emerson yang dikutip dari Handayani (1994:16) yang menyatakan bahwa "Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya." Efektivitas memiliki arti berhasil atau tepat guna. Efektif merupakan kata dasar, sementara kata sifat dari efektif adalah efektivitas. Menurut Effendy (2006 :14) mendefinisikan efektivitas sebagai berikut: "Komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah personil yang ditentukan". (Syah, Satria Fahrudin 2018)

## LANDASAN TEORI

### Pengertian Strategi

Menurut Kartono (2005:76) Kepemimpinan berasal dari kata: pemimpin, yang berarti seseorang yang memiliki kecakapan dan kelebihan, khususnya kecakapan dan kelebihan dalam satu bidang, sehingga dia mampu mempengaruhi orang lain untuk bersama-sama melakukan aktifitas demi tercapainya suatu maksud dan beberapa tujuan. Umar (2008:38) mendefinisikan kepemimpinan sebagai "proses pengarahan dan usaha mempengaruhi aktivitas yang berkaitan dengan tugas dari para anggota kelompok". Sedangkan Menurut Hasibuan (2003:170) "Kepemimpinan adalah cara seorang pemimpin mempengaruhi perilaku bawahan agar mau bekerja sama dan bekerja secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi. Dimana definisi kepemimpinan akhirnya dikategorikan menjadi tiga elemen. (Susanto A.B; Koesnadi Kardi, 2003:115), yakni :

- a. Kepemimpinan merupakan proses; 14 15
- b. Kepemimpinan merupakan suatu konsep relasi (hubungan) antara pimpinan dan bawahan;
- c. Kepemimpinan merupakan ajakan kepada orang lain. Dari berbagai pengertian diatas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa secara umum pengertian pemimpin adalah suatu kewenangan yang disertai kemampuan seseorang dalam memberikan pelayanan untuk menggerakkan orang-orang yang berada dibawah koordinasinya dalam usaha mencapai tujuan yang ditetapkan suatu organisasi. (Julian 2021)

Mustakim (2015:11) Tipe kepemimpinan Kepala desa dibagi menjadi tiga tipe kepemimpinan, yakni Kepemimpinan Regresif, Kepemimpinan Konservatif- Involutif dan Kepemimpinan Inovatif-Progresif.

- a. Kepemimpinan Regresif Pada Kepemimpinan Regresif dapat dimaknai sebagai kepemimpinan yang berwatak otokratis, secara teori otokrasi berarti pemerintahan yang kekuasaan politiknya dipegang oleh satu orang. Salah satu cirinya adalah anti perubahan, terkait dengan perubahan tata kelola baru tentang Desa baik itu Musyawarah Desa, usaha ekonomi bersama Desa dan lain-lain sudah pasti akan ditolak. Desa yang parochial (hidup bersama berdasarkan garis kekerabatan, agama, etnis atau yang lain) serta Desa-Desa korporatis (tunduk pada kebijakan dan regulasi negara) biasanya melahirkan kepemimpinan seperti ini.
- b. Kepemimpinan Konservatif-Involutif Kepemimpinan ini merupakan model kepemimpinan yang ditandai dengan hadirnya Kepala Desa yang bekerja apa adanya (taken for granted), menikmati kekuasaan dan kekayaan, serta tidak berupaya melakukan inovasi (perubahan) yang mengarah pada demokratisasi dan kesejahteraan rakyat. Kepemimpinan tipe ini pada umumnya hanya melaksanakan arahan dari atas, melaksanakan fungsi Kepala Desa secara tekstual sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Kepala Desa.
- c. Kepemimpinan Inovatif-Progresif Kepemimpinan tipe ini ditandai dengan adanya kesadaran baru mengelola kekuasaan untuk kepentingan masyarakat banyak. Model kepemimpinan ini tidak anti terhadap perubahan, membuka seluas-luasnya ruang partisipasi masyarakat, transparan serta akuntabel. Pada pola kepemimpinan yang demikian Kepala Desa tersebut justru akan mendapatkan legitimasi yang lebih besar dari masyarakatnya. Aspek paling fundamental dalam menjalankan kepemimpinan Desa adalah Legitimasi, hal ini terkait erat dengan keabsahan, kepercayaan dan hak berkuasa. Legitimasi berkaitan dengan sikap masyarakat terhadap kewenangan. Kewenangan untuk memimpin, memerintah, serta menjadi wakil atau representasi dari masyarakatnya. Berdasarkan pendapat para ahli di atas,



maka kepemimpinan adalah suatu individu yang dapat mempengaruhi kelompok (Kepala desa mempengaruhi masyarakat) dalam memperoleh dukungan dari masyarakat dalam tujuan pembangunan desa. Kepemimpinan Kepala desa dalam mengarahkan mempengaruhi dan mengawasi perangkat desa serta masyarakat dalam pembangunan desa.

### **Fungsi Pemimpin**

Fungsi pemimpin dalam suatu organisasi tidak dapat dibantah merupakan sesuatu fungsi yang sangat penting bagi keberadaan dan kemajuan organisasi yang bersangkutan. Rivai, (2002) menyatakan bahwa pada dasarnya fungsi kepemimpinan memiliki 2 aspek yaitu

- 1 Fungsi administrasi, yakni mengadakan formulasi kebijaksanaan administrasi dan menyediakan fasilitasnya.
- 2 Fungsi sebagai Top Manajemen, yakni mengadakan planning, organizing, staffing, directing, commanding, dan controlling.
- 3 Fungsi Delegasi, Dalam melaksanakan fungsi delegasi, pemimpin memberikan pelimpahan wewenang, membuat, atau menetapkan keputusan. Fungsi delegasi sebenarnya adalah kepercayaan seorang pemimpin kepada orang yang diberi kepercayaan untuk pelimpahan wewenang dengan melaksanakan secara bertanggungjawab. Fungsi pendelegasian ini, harus diwujudkan karena kemajuan dan perkembangan kelompok tidak mungkin diwujudkan oleh pemimpin seorang diri. Jika pemimpin bekerja seorang diri, ia pasti tidak dapat berbuat banyak dan mungkin dapat menjadi tidak berarti sama sekali.
- 4 Fungsi pengendalian berasumsi bahwa kepemimpinan yang efektif harus mampu mengatur efektivitas anggotanya secara terarah dan dalam koordinasi yang efektif, sehingga memungkinkan tercapainya tujuan bersama secara maksimal. Dalam melaksanakan fungsi pengendalian, pemimpin dapat mewujudkannya melalui kegiatan bimbingan, pengarahan, koordinasi, dan pengawasan. Dalam melakukan kegiatan tersebut berarti pemimpin berusaha mencegah terjadinya kekeliruan perseorangan dalam melaksanakan beban kerja atau perintah dari pimpinannya.

Upaya mewujudkan kepemimpinan yang efektif, maka kepemimpinan tersebut harus dijalankan sesuai dengan fungsinya. Sehubungan dengan hal tersebut, fungsi kepemimpinan berhubungan langsung dengan situasi sosial dalam kehidupan kelompok masing-masing yang mengisyaratkan bahwa setiap pemimpin berada didalam, bukan berada diluar situasi itu. Upaya mewujudkan kepemimpinan yang efektif, maka kepemimpinan tersebut harus dijalankan sesuai dengan fungsinya. Sehubungan dengan hal tersebut, fungsi kepemimpinan berhubungan langsung dengan situasi sosial dalam kehidupan kelompok masing-masing yang mengisyaratkan bahwa setiap pemimpin berada didalam, bukan berada diluar situasi itu. Pemimpin harus berusaha agar menjadi bagian didalam situasi sosial kelompok atau organisasinya. Fungsi kepemimpinan memiliki dua dimensi yaitu :

- 1 Dimensi yang berhubungan dengan tingkat kemampuan mengarahkan dalam tindakan atau aktivitas pemimpin, yang terlihat pada tanggapan orang-orang yang dipimpinnya.
- 2 Dimensi yang berkenaan dengan tingkat dukungan atau keterlibatan orang-orang yang dipimpin dalam melaksanakan tugas-tugas pokok atau organisasi, yang dijabarkan dan dimanifestasikan melalui keputusan-keputusan kebijakan pemimpin. (Astutie 2018)

### **Efektivitas pelayanan Publik**

Pelayanan publik merupakan pelayanan dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pelayanan publik sebagai indikator penting dalam penilaian kinerja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Penyelenggaraan pemerintahan dikatakan baik jika pelayanan publik yang dilakukan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Pelayanan yang baik dan berkualitas memberikan implikasi kepuasan kepada masyarakat, karena masyarakat secara langsung menilai terhadap kinerja yang diberikan. Indikator kepuasan masyarakat itulah yang menjadi tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan. Moenir (2015:17) mengemukakan pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan aktivitas orang lain.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik memberikan definisi pelayanan publik adalah kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Nilai baik tidaknya sebuah layanan sering kali dilihat dari bagaimana cara petugas memberi layanan dalam berkomunikasi dengan pelanggan. Untuk keterampilan komunikasi ini haruslah dimiliki dan dikuasai dengan baik oleh setiap petugas pemberi layanan. Pelayanan publik adalah pemberian jasa yang diberikan oleh suatu organisasi

(perusahaan, pemerintah, swasta) kepada publiknya dengan atau tanpa pembayaran guna memenuhi kebutuhan dana atau kepentingan masyarakat (Lyndawaty, 2017:23). Untuk memberikan pelayanan publik yang terbaik, peran komunikasi menjadi sangat penting dalam hubungan dengan bagaimana suatu organisasi berinteraksi dan memperlakukan publiknya, karena komunikasi adalah memanusiakan manusia (human communications). Dalam konteks komunikasi, maka bagaimana cara memperlakukan publik saat melakukan pelayanan publik saat berkomunikasi merupakan ukuran dari kualitas pelayanan publik. Karenanya, salah satu ukuran untuk menilai pelayanan publik adalah dengan melihat etika komunikasi aparat saat melaksanakan fungsi pelayanan publik. (Rahmat 2022)

Pengaruh kepemimpinan Kepala Terhadap Efektifitas Pelayanan Pada Masyarakat Menurut Otonomi Desa UU No.6 Tahun 2014

Diskripsi Umum pengaruh kepemimpinan kepala Desa terhadap efektivitas pelayanan pada masyarakat menurut Otonomi Desa berdasarkan Undang-Undang No 6 tahun 2014 dan peran Pemerintah dalam pembangunan Desa. Peraturan perundang-undang juga telah mengatur dan berlandaskan pada Undang-Undang Nomor.25 tahun 2004 tentang perencanaan pembangunan Nasional kemudian undang-undang Nomor. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah serta undang-undang Nomor.33 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah kemudian dengan munculnya atau berlakunya Undang-undang Desa Nomor.6 Tahun 2014 maka dengan jelas dan secara hukum desa memiliki kewenangan secara penuh dalam proses pengelolaan pemerintahan dalam proses pembangunan Desa. Dalam proses pembangunan sesuai dengan Undang-Undang Desa No.6 Tahun 2014 mengacu pada dua pola pendekatan yaitu "Desa Membangun dan Membangun Desa" yang mana bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pembangunan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan Desa merupakan suatu proses yang berlangsung di Desa dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional yang mencakup segala aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat. faktor yang ikut menentukan tingkat partisipasi masyarakat Desa. Artinya kepala Desa beserta aparat Desanya harus mampu menjalankan roda pemerintahan Desanya secara jujur, transparan, akuntabel dan religius. Dengan demikian masyarakat yang dipimpin akan cenderung mengikuti arahan dari pemerintah Desa guna menyumbangkan tenaga mereka dalam pelaksanaan pembangunan di Desanya. Oleh karena itu walaupun tersedia anggaran untuk pembangunan namun mereka tidak berharap untuk dibayar. Namun jika kita lihat di lain pihak maka. Menurut (MT, 40 Tahun) masyarakat mengatakan bahwa: "Pada dasarnya semua masyarakat Desa Seburuk 1 ingin berpartisipasi dalam pelaksanaan program-program pembangunan terutama dalam bentuk partisipasi tenaga. Tingkat partisipasi masyarakat di Desa Sangatlah buruk (Agustus 2018)". (Jemikan 2018)

## METODE PENELITIAN

### Metode Analisis

Pada Penelitian ini Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif yaitu penelitian berupa angka-angka dan dianalisis secara statistik. Dan menggunakan pendekatan korelasional. Oleh karena itu penelitian kuantitatif dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis data dan mengetahui pengaruh Kepemimpinan kepala Desa Terhadap Efektifitas pelayanan pada Masyarakat Desa Paku Haji Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah. Dalam penelitian ini peneliti menelaah gejala yang terjadi di lapangan untuk membuktikan kebenarannya dan dinilai secara ilmiah berdasarkan kerangka teoritis yang berkenaan dengan permasalahan yang di angka. (Hardian 2020).

Teknik pengumpulan sampel dalam penelitian ini adalah sampel acak sederhana (simple random sampling). Didalam Ruqo'iyah (2012 :53-54) menyatakan definisi sampel acak sederhana (simple random sampling) adalah cara pengambilan sampel dengan memilih langsung dari populasi dan besar peluang setiap anggota populasi untuk menjadi sampel sangat besar. Pelaksanaan sampel random sampling disebabkan anggota populasi penelitian ini dianggap homogen karena sampel yang diambil adalah Kepala Desa, Seluruh Komponen Perangkat Desa dan Masyarakat Desa Paku Haji Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner penelitian yang dilakukan. Uji validitas dilakukan dengan menggunakan alat bantu program SPSS 29.0. Uji validitas dilakukan dengan membandingkan  $r$  hitung >  $r$  Lampiran. Jika  $r$  hitung >  $r$  Lampiran maka kuesioner dinyatakan valid dan sebaliknya jika  $r$  hitung <  $r$  Lampiran maka kuesioner dinyatakan tidak valid. Hasil uji validitas atas kuesioner penelitian ini disajikan pada Lampiran berikut:

**Tabel 4.4 Hasil Uji Validitas**

	Pernyataan	$r$ hitung	$r$ Lampiran (0,05 dan $df = N - 2$ )	Keterangan
Gaya Kepemimpinan (X)	P1	.411	0,2146	Valid
	P2	.479	0,2146	Valid
	P3	.647	0,2146	Valid
	P4	.495	0,2146	Valid
	P5	.574	0,2146	Valid
	P6	.470	0,2146	Valid
	P7	.490	0,2146	Valid
	P8	.592	0,2146	Valid
	P9	.662	0,2146	Valid
	P10	.532	0,2146	Valid
Efektifitas Pelayanan (Y)	P1	.442	0,2146	Valid
	P2	.389	0,2146	Valid
	P3	.286	0,2146	Valid
	P4	.291	0,2146	Valid
	P5	.277	0,2146	Valid
	P6	.489	0,2146	Valid
	P7	.248	0,2146	Valid
	P8	.406	0,2146	Valid
	P9	.336	0,2146	Valid
	P10	.245	0,2146	Valid

Sumber :Data Diolah (2024)

Berdasarkan Lampiran hasil uji validitas di atas, dapat diketahui bahwa  $r$  hitung dari semua item pernyataan lebih besar dari  $r$  Lampiran, maka semua item yang digunakan dalam penelitian ini dinyatakan valid sehingga dapat digunakan sebagai instrumen penelitian.

### Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur kepercayaan instrumen kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk untuk mengetahui konsistensi alat ukur dan konsisten jika pengukuran tersebut diulang dari waktu ke waktu. Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menghitung besarnya nilai Cronbach's Alpha ( $\alpha$ ). Apabila nilai Cronbach's Alpha ( $\alpha$ ) lebih besar dari 0,60, maka jawaban dari responden pada kuesioner dinyatakan reliabel. Jika nilai Cronbach's Alpha ( $\alpha$ ) lebih kecil dari 0,60 maka jawaban dari responden pada kuesioner dinyatakan tidak reliabel. Hasil uji reliabilitas instrument kuesioner penelitian ini dapat dilihat pada Lampiran berikut:

**Lampiran 4.5 Hasil Uji Reliabilitas**

No	Variabel	Cronbach's Alpha ( $\alpha$ )	Standar Reliabilitas	Keterangan
1	Gaya Kepemimpinan (X)	.722	0.60	Reliabel
2	Efektifitas pelayanan(Y)	.698	0.60	Reliabel

Sumber: Data dioalah (2024)

Berdasarkan hasil uji reliabilitas di atas, diketahui nilai Cronbach's Alpha ( $\alpha$ ) pada variabel Gaya Kepemimpinan (X) sebesar .722, dan variabel Pembuatan Efektivitas pelayanan (Y) sebesar 0,698 . Jadi dapat disimpulkan bahwa semua kuesioner dalam penelitian ini reliabel atau konsisten.

#### Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah sampel yang diambil berasal dari populasi yang sama atau berdistribusi normal. Metode yang digunakan untuk melakukan uji normalitas data dalam penelitian ini dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Dasar Pengambilan keputusan :

Jika Nilai signifikansi  $>0,05$ , maka nilai residual berdistribusi normal.

Jika Nilai signifikansi  $<0,05$ , maka nilai residual tidak berdistribusi normal.

#### Lampiran.4.6 Hasil Uji Normalitas

##### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

			Unstandardized Residual	
N			84	
Normal Parameters <sup>a,b</sup>				
		Mean	.0000000	
		Std. Deviation	2.67209696	
Most Extreme Differences		Absolute	.078	
		Positive	.078	
		Negative	-.077	
Test Statistic			.078	
Asymp. Sig. (2-tailed) <sup>c</sup>			.200 <sup>d</sup>	
Monte Carlo Sig. (2-tailed) <sup>e</sup>		Sig.	.226	
		99% Confidence Interval	Lower Bound	.215
			Upper Bound	.237

Sumber : Data Primer Diolah (2024)

Berdasarkan Hasil Uji normalitas dari Lampiran di atas diketahui nilai signifikansi  $0.237 > 0.05$  maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi Normal. Uji Linieritas. Uji linearitas ini digunakan untuk melihat apakah spesifikasi model yang digunakan sudah benar atau tidak. Dari hasil pengolahan data diperoleh hasil uji linearitas sebagai berikut :

Dasar Pengambilan keputusan Jika nilai sig deviation from liniarity  $>0.05$  maka terdapat hubungan yang linier antara variabel X dengan variabel Y. Jika nilai sig deviation from liniarity  $<0.05$  maka tidak terdapat hubungan yang linier antara variabel X dengan variabel Y.

Tabel.4.7 Hasil Uji Linieritas

ANOVA Table							
			Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Y * X	Between Groups	(Combined)	44.121	18	2.451	14.662	.000
		Linearity	40.392	1	40.392	241.606	.000
		Deviation from Linearity	3.730	17	.219	1.312	.214
	Within Groups		10.867	65	.167		
	Total		54.988	83			

Sumber :Data Di oleh (2024)



Berdasarkan hasil Lampiran 4.8 didapat nilai variabel Gaya kepemimpinan diperoleh nilai sig sebesar 0,214 > 0,05 (Alpha), maka dapat disimpulkan bahwa data yang diperoleh dari 87 responden dalam penelitian ini dinyatakan Linier

### **Pembahasan hasil penelitian.**

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan pada Kantor Desa Paku Haji Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah diperoleh hasil-hasil yang penulis uraikan dalam bentuk Lampiran dengan menggunakan Lampiran Frekuensi berdasarkan pada masing-masing indikator kepemimpinan kepala Desa dan efektifitas pelayanan pada masyarakat Desa Paku Haji

### **Gambaran Kepemimpinan Kepala Desa Paku Haji Kecamatan Pondok Kubang kabupaten Bengkulu Tengah.**

Pada variabel kepemimpinan kepala desa terdapat empat indikator yang dinilai yaitu indikator gaya kepemimpinan kepala desa, kompetensi kepemimpinan, komitmen kepemimpinan, visi dan misi kepemimpinan. Pada proses penelitian yang dilakukan pada 84 responden menunjukkan hasil penelitian sebagai berikut: secara umum dapat dilihat secara keseluruhan perolehan persentase dalam kategori sangat Setuju 26,44 persen, Setuju 40,95 persen, netral 32,61 persen, tidak baik 0 persen dan sangat tidak baik 0 persen. Hal ini menunjukkan bahwa perhitungan rata-rata di atas menunjukkan Gambaran Kepemimpinan Kepala Desa di Desa Paku Haji Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah yang meliputi : (1) Gaya Kepemimpinan, (2) Kompetensi kepemimpinan, (3) Komitmen Kepemimpinan dan, (4) Visi misi kepemimpinan termasuk dalam kategori sedang. Seperti yang dikemukakan oleh Arikunto (1999), bila persentase yang diperoleh merujuk kepada interpretasi dengan interval. 76% - 100% adalah kategori sangat tinggi, 56% - 75% adalah kategori tinggi 40% - 55% adalah kategori sedang Kurang dari 40% adalah kategori rendah. Maka peneliti dapat simpulkan Berdasarkan hasil analisis deskriptif frekuensi memberikan informasi bahwa Gambaran kepemimpinan Kepala Desa Paku Haji Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah kedalam kategori sedang atau Baik, hal ini ditunjukkan dengan persentase mencapai 40,95%

### **Efektivitas Pelayanan Kepala Desa Pada masyarakat Desa Paku Haji Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah.**

Pada variabel Efektivitas Pelayanan terdapat tiga indikator yang dinilai yaitu indikator, Ketersediaan pelayanan, Kualitas pelayanan, dan kepuasan Masyarakat. Pada proses penelitian yang dilakukan pada 84 responden menunjukkan, secara umum dapat dilihat secara keseluruhan perolehan persentase dalam kategori sangat baik 23,92 persen, baik 46,43 persen, netral 28,81 persen, tidak Setuju 3,4 persen dan sangat tidak baik 0 persen. Hal ini menunjukkan bahwa perhitungan rata-rata di atas menunjukkan sebanyak 84 responden Efektivitas Kepala Desa pada masyarakat Desa Paku Haji Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah termasuk dalam kategori Sedang. Seperti yang dikemukakan oleh Arikunto (1999), bila persentase yang diperoleh merujuk kepada interpretasi dengan interval 76% - 100% adalah kategori sangat tinggi, 56% - 75% adalah kategori tinggi 40% - 55% adalah kategori sedang Kurang dari 40% adalah kategori rendah. Maka Peneliti Dapat Simpulkan Berdasarkan Hasil Analisis Deskriptif Memberikan Informasi Bahwa Efektivitas Pelayanan Kepala Desa Pada Masyarakat Paku Haji Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah termasuk Kedalam Kategori Tinggi, Hal Ini Ditunjukkan Dengan Persentase Yang Dicapai Yaitu 73,75% Hasil Uji Regresi Sederhana.

Pada bagian ini rumus regresi sederhana digunakan karena peneliti ingin menjawab rumusan masalah nomor satu dan dua yaitu bagaimanakah gambaran kepemimpinan kepala desa Paku Haji kecamatan pondok kubang kabupaten Bengkulu Tengah dan bagaimana efektivitas pelayanan kepala desa pada masyarakat desa Paku Haji kecamatan pondok kubang kabupaten Bengkulu Tengah. Dasar Pengambilan keputusan :

Jika Nilai signifikansi >0,05 maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y.

Jika nilai t hitung < T Lampiran maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y.

**Tabel 4.10 Hasil regresi linier Sederhana**

Variabel	Regresi b
Konstanta (a)	32.682
Gaya kepemimpinan ( X)	.169

Sumber: Data primer di olah 2024

Dari hasil analisis menggunakan program SPSS versi 26.0 seperti diperlihatkan pada Lampiran diatas. Maka diperoleh nilai koefisiensi regresi b sebesar .169 dan nilai konstanta a sebesar 32.682. Dengan demikian persamaan regresi sederhana dari data variabel gaya Kepemimpinan dengan Efektifitas pelayanan Aparat Desa paku haji Kecamatan Pondok kubang Kabupaten bengkulu Tengah  $\hat{Y} = 32.682 + 0,169 X$

Interprestasi persamaan regresi linier sederhana di atas menunjukkan nilai konstanta menunjukkan pengaruh positif variabel Independen (X) 0.169 merupakan nilai koefisiensi regresi variabel X terhadap variabel Y artinya jika variabel X mengalami kenaikan satu satuan maka Y mengalami kenaikan sebesar 0.175 Maka Dapat Di Simpulkan Bahwa Terdapatnya Pengaruh Yang Positif Dan Signifikan Antara Fungsi Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Efektivitas Pelayanan Pada Masyarakat Desa Paku Haji Kecamatan Pondok Kabupaten Bengkulu Tengah." Untuk mengetahui apakah model persamaan garis regresi tersebut dapat digunakan untuk menarik kesimpulan, apakah persamaan yang telah diperoleh signifikan atau tidak dapat diketahui dengan menggunakan analisis Uji hipotesis (uji t) dan Koefisiensi korelasi.. Uji Hipotesis (Uji t) Setelah melakukan uji Regresi sederhana dan uji asumsi klasik dalam model regresi, langkah selanjutnya yaitu melakukan uji hipotesis dengan melakukan uji koefisien Korelasi dan uji statistic t (uji t): Pengujian hipotesis Dengan uji koefisiensi korelasi Uji koefisiensi Korelasi Berfungsi untuk Mengetahui Berapa persen pengaruh yang diberikan secara persial kepemimpinan kepala desa terhadap efektivitas pelayanan pada masyarakat desa paku haji.

Selanjutnya untuk mengetahui apakah hipotesis diterima atau ditolak terdapat pengaruh kepemimpinan kepala Terhadap efektivitas pelayanan pada masyarakat desa paku haji maka dilakukan analisis regresi sederhana. Dalam hal ini berlaku ketentuan bahwa, bila t hitung lebih besar dari t Lampiran maka hipotesis diterima, tetapi jika sebaliknya jika t hitung lebih kecil dari t Lampiran maka hipotesis ditolak. Berdasarkan hasil analisis regresi sederhana Dari Lampiran di atas data yang diolah menggunakan bantuan SPSS versi 26,0 maka diperoleh  $b = 0,169$  dan  $a = 32.682$  dengan persamaan garisnya  $\hat{Y} = 32.682 + 0,169 X$  dan diperoleh t hitung sebesar 14.634 sedangkan t Lampiran dengan taraf signifikansi 0,05 % maka diperoleh hasil = 1,989. Karena disini t hitung > t Lampiran maka hipotesis dinyatakan diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapatnya pengaruh yang positif dan signifikan antara fungsi kepemimpinan Kepala Desa terhadap efektivitas Pelayanan Pada Masyarakat Desa Paku Haji.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa gambaran kepemimpinan kepala desa paku haji kecamatan karang tinggi kabupaten bengkulu tengah termasuk kedalam kategori Sedang atau Baik, hal ini ditunjukkan dengan jumlah rata rata persentase yang dicapai yaitu 40,95%. dalam menentukan dan mengetahui gambaran kepemimpinan kepala desa paku haji peneliti menguji data-data yang telah disediakan. Uji yang digunakan yaitu deskriptif frekuensi dari hasil tanggapan responden dengan 4 variabel , yang mana hasil uji secara umum dapat dilihat secara keseluruhan perolehan persentase dalam kategori sangat baik 26,44 persen, Setuju 40,95 persen, netral 32,61 persen, tidak baik 0 persen dan sangat tidak baik 0 persen. Hal ini menunjukkan bahwa perhitungan rata-rata di atas menunjukkan sebanyak 84 responden mencapai 40,95 persen. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa Efektivitas pelayanan kepala desa paku haji kecamatan karang tinggi kabupaten bengkulu tengah termasuk kedalam kategori Tinggi, hal ini ditunjukkan dengan jumlah rata rata persentase yang dicapai yaitu 73,75%. dalam menentukan dan mengetahui efektivitas pelayanan kepala desa paku haji peneliti menguji data-data yang telah disediakan. Uji yang digunakan yaitu deskriptif frekuensi dari hasil tanggapan responden dengan 4 variabel , yang mana hasil uji secara umum dapat dilihat secara keseluruhan perolehan persentase dalam kategori sangat Setuju 23,92 persen, setuju 46,43 persen, netral 28,81 persen, tidak baik 2,0 persen dan sangat tidak baik 0 persen. Hal ini menunjukkan bahwa perhitungan rata-rata di atas mencapai 73,75 dengan 84 responden.

Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa kepemimpinan kepala desa berpengaruh dan signifikan terhadap efektifitas pelayanan pada masyarakat desa paku haji, dalam menentukan dan mengetahui Pengaruh kepala desa terhadap efektifitas pelayanan pada masyarakat peneliti menguji data-data yang telah disediakan. Uji yang digunakan yaitu uji regresi sederhana dan uji t dimana hasil dari uji regresi sederhana adalah dapat berpengaruh secara signifikan karena dalam mengambil keputusan, apabila nilai signifikan < kurang dari 0,05 mengandung arti bahwa ada pengaruh variabel (x) terhadap (y) begitu pula sebaliknya jika nilai signifikan > lebih besar dari 0,05 mengandung arti bahwa tidak ada pengaruh variabel (x) terhadap variabel (y) sedangkan hasil dari uji ini nilai signifikan 0.00 maka ditarik kesimpulan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan kepemimpinan kepala desa terhadap efektifitas pelayanan pada masyarakat desa paku haji. Dan uji t itu sendiri dapat berpengaruh positif karena dalam mengambil keputusan jika nilai t-hitung > lebih besar dari t-Lampiran maka dapat dinyatakan berpengaruh secara signifikan kepemimpinan kepala desa terhadap efektifitas pelayanan pada masyarakat desa paku haji, begitupun sebaliknya jika t-hitung < lebih kecil dari t-Lampiran maka dapat dinyatakan tidak Ada kepemimpinan kepala desa terhadap efektifitas pelayanan pada masyarakat desa paku haji. Hasil dari uji t dapat disimpulkan bahwa ada kepemimpinan kepala desa terhadap efektifitas pelayanan pada masyarakat desa paku haji. Sedangkan hasil uji t, Dapat dilihat dari hasil uji t-hitung dari variabel kepemimpinan kepala desa terhadap efektifitas pelayanan pada masyarakat desa paku haji 14,634 > 1.989 sehingga variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen dan signifikansi bernilai 0.00 < 0.05 sehingga Hipotesis diterima.

### Saran

Sehubungan dengan kesimpulan peneliti di atas, maka diajukan saran sebagai berikut:

1. Para kepala Desa di Kecamatan Pondok Kubang dapat menciptakan dan memperbaharui kepemimpinan Kepala Desa yang kondusif dan menyenangkan sehingga Aparat Desa dalam menjalankan tugas menjadi nyaman dan efektifitas pelayanan Aparat Desa meningkat lagi.
2. Kepada Aparat Desa di Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah agar lebih menyadari tugas pentingnya sebagai pelayan masyarakat yang merupakan tanggung jawabnya sebagai Aparat Desa.

### DAFTAR PUSTAKA

- Alfian, Yani, and Apip Pudih Rahmat. 2019. "Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Kinerja Aparat Desa Di Desa Sangkanhurip Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung." *JISIPOL| Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 3(3): 43–60.
- Astutie, Cintya Septiana Andri. 2018. "GAYA KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DI DESA MATTOMBANG KECAMATAN MATTIRO SOMPE KABUPATEN PINRANG." : 1–26.
- Erman, N, and A Fahroby. 2022. "Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Rusindo Expertiza Inspeksi Pekanbaru." *MAPAN: Jurnal Manajemen ...*: 1–90. <https://jurnal.institute-ehmri.ac.id/index.php/mapan/article/view/108%0Ahttps://jurnal.institute-ehmri.ac.id/index.php/mapan/article/download/108/85>.
- Hardian, Dkk. 2020. "Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif." : 50–72.
- Ichsan, Muhammad. 2018. "Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara Makassar 2018." : 70.
- Indonesia, Republik. 2024. "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA." (190185): 39.
- Jemikan. 2018. "DiH Jurnal Ilmu Hukum." *DiH Jurnal Ilmu Hukum* 14(7): 53–67.
- Julian, Didik. 2021. "Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Pelayanan Administrasi Pemerintahan Bidang Layanan Sipil Di Desa Laban Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik." *Media Mahardhika* 19(3): 489–516. doi:10.29062/mahardhika.v19i3.273.
- Rahmat, Dwi Rafika. 2022. "Efektivitas Kinerja Aparatur Desa Dalam Pelayanan Publik Pada Kantor Desa Manis Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan." *Skripsi Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area*: 1–97. <http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/18438>.
- Sumeru, Arief. 2016. "Kedudukan Pejabat Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa."

- JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik)* 4(1): 47–56. doi:10.21070/jkmp.v4i1.198.
- Syah, Satria Fahrudin, 2018. 2018. “Efektivitas Pelayanan Administrasi Masyarakat Desa Dan Kelurahan (PSDMS) Dalam Perwujudan Good Governance (Studi Di Desa Sambirejo Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen).” : i–126. <http://lib.unnes.ac.id/38248/1/8111413188.pdf>.
- Syarif, M. 2010. “Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah.” : 2014.
- Yesa Putriani. 2021. “Program Studi Hukum Tata Negara / Siyasa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri ( lain ) Bengkulu Tahun 2021 M / 1442 H.” *Repository.iainbengkulu.Ac.Id*. <http://repository.iainbengkulu.ac.id/id/eprint/6750>.